

**JURNAL**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG BATU BREKSI ILEGAL  
DI KABUPATEN BANTUL**



**Disusunoleh :**

**BERNARD ERLAN PRADANA**

**N P M : 130511148**

**Program studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG BATU BREKSI ILEGAL  
DI KABUPATEN BANTUL**



**Diajukan oleh :**

**BERNARD ERLAN PRADANA**

**N P M : 130511148**

**Program studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui oleh dosen pembimbing**

**Dosen Pembimbing**

***FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.***

**Tanggal :**

**Tanda Tangan :**

*20/7/2015*

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS  
HUKUM**

***FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.***

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANG BATU BREKSI ILEGAL DI KABUPATEN BANTUL**

**Bernard Erlan Pradana**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : [Bernarderlanpradana@gmail.com](mailto:Bernarderlanpradana@gmail.com)

## ***Abstract***

### *Law Enforcement Towards Illegal Breccia Stone Miners in Bantul Regency*

*This research entitled “ Law Enforcement Towards Illegal Breccia Stone Miners in Bantul Regency”, was motivated by the rampant of illegal breccia stone mining that caused environmental damage and victims. The legal issues raised are (1) How the law enforcement is towards illegal breccia stone mining in Bantul regency?, and (2) whether there are any obstacles in law enforcement towards illegal breccia stone mining in Bantul regency? The types of this research is Empirical Research that focuses on social facts. The research finding has shown that law enforcement towards illegal breccia stone miners has not been done yet. This happens because of some obstacles, ie, there was no good coordination between government agencies, the only department knowing about this illegal breccia stone mining is Disaster Management Agency of Bantul Regency (BPBD) and the chief of village “ Segoroyoso”. However, the situation right now is the transition period as result of the Act Number 23 of 2014 about the Local Government that transferred the licensing authority of Bantul Regency to the Provincial Government Special Region of Yogyakarta (DIY). This authority transferring creates confusion between both government, the Province of DIY and Bantul Regency related to their licensing authorities.*

*Keywords: law enforcement, illegal mining, breccia stone*

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam. Berbagai macam sumber daya alam dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan hingga kini masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada alam. Sumber daya alam yang banyak dikonsumsi masyarakat dalam penggunaannya haruslah

dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin, karena penggunaan sumber daya alam secara berlebihan yang tidak dibarengi dengan pemeliharaan akan membawa berbagai bencana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sunaryati Hartono, 1995, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*,

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat ketentuan bahwa : Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menguasai serta menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat, lebih lanjut kewenangan pemerintah untuk menguasai dan menyelenggarakan pertambangan juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

- (1)Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2)Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009, bahan galian secara umum dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan dengan usaha pertambangannya seperti dengan yang tertulis dalam Ayat (1) dan (2) pasal 34 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 :

- (1)Usaha Pertambangan dikelompokkan atas :
  - a.Pertambangan mineral; dan
  - b.Pertambangan batubara.
- (2)Pertambnganan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
  - a.Pertambangan mineral radio aktif;
  - b.Pertambangan mineral logam;
  - c.Pertambangan mineral bukan logam; dan
  - d.Pertambangan batuan.

Bahan galian tambang di Indonesia memiliki jenis yang sangat beragam. Keberagaman ini disebabkan karena perbedaan letak, kondisi geografis, kandungan mineral, serta proses pembentukan dari lahan pertambangan tersebut,<sup>2</sup> seperti halnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat beberapa daerah penghasil tambang, di Kabupaten Gunung Kidul terdapat tebing-tebing yang mengandung kapur yang biasa dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan batu kapur, di Kabupaten Sleman khususnya daerah sekitar kawasan Gunung Merapi terdapat lahan pertambangan pasir dan krikil, dan di Kabupaten Bantul terdapat

---

Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hlm 1

---

<sup>2</sup>Ahmad Yani, 2007, *GeografiMenyikap Fenomena Geosfer*, Jakarta, Grafindo Media Pratama, hlm 100

tebing breksi yang saat ini dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertambangan batu breksi.

Usaha pemanfaatan lahan pertambangan di Kabupaten Bantul yang berupa usaha pertambangan batu breksi saat ini sedang marak dilakukan. Agar ketertiban dalam setiap kegiatan pertambangan dapat terwujud, pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur jalannya kegiatan pertambangan.<sup>3</sup> Dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY memegang kuasa atas lahan pertambangan di wilayah Provinsi DIY, sesuai dengan yang tertulis dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang semula pemerintah Kabupaten atau Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah provinsi mengatur jalannya kegiatan pertambangan melalui sistem perizinan, dan izin yang dapat diberikan adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terdapat pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan :

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah

izin untuk melaksanakan usaha pertambangan

Berdasarkan ketentuan tersebut berarti setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin. Namun dalam praktek, berdasar hasil pengamatan melalui pemberitaan surat kabar *online* serta hasil penelitian pendahuluan di lingkungan masyarakat sekitar kawasan Kabupaten Bantul, masih banyak pelaku penambangan batu breksi yang tidak memiliki izin.<sup>4</sup> Penambangan batu breksi juga berdampak langsung pada lingkungan, sebab lahan yang ditambang kini membentuk tebing dan jurang serta cekungan-cekungan, bahkan menurut pemberitaan cekungan ini telah menelan korban jiwa karena tenggelam di dalam lubang yang terbentuk akibat dari kegiatan pertambangan.<sup>5</sup> Pelaksana Harian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul Dwi Daryanto mengatakan bahwa kawasan perbukitan Srumbung yang ditambang sangat berpotensi menjadi kawasan rawan bencana, sebab penambangan yang dilakukan dengan cara tegak

---

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Peizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 193

---

<sup>4</sup><http://jogja.antaranews.com/berita/332062/bantul-tidak-berwenang-mengeluarkan-izin-tambang> , yang di akses pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 21:20  
<sup>5</sup><http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/07/tambang-breksi-bantul-lahan-rusak-makan-korban-perbaikan-tunggu-inisiatif-warga-774675> yang diakses pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 21:37

lurus, kemudian menghasilkan tebing di kanan dan kiri jalan.<sup>6</sup> Walaupun terdapat banyak dampak negatif, namun hingga kini kegiatan penambangan batu breksi masih banyak ditemui di daerah Kabupaten Bantul. Kegiatan pertambangan yang tidak mempunyai izin mestinya ditertibkan atau para pelaku penambangan ilegal skala menengah atau besar mesti dikenai sanksi agar dapat memberikan efek jera serta dampak negatif dapat dihindarkan, namun pada kenyataannya, pertambangan batu breksi tanpa izin tersebut masih banyak dilakukan. Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diajukan dan dirumuskan judul penelitian: Penegakan Hukum Terhadap Penambang Batu Breksi di Kabupaten Bantul.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial, dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang

digunakan yaitu dengan wawancara, dan studi kepustakaan. Responden penelitian ini adalah 5 penambang batu breksi yaitu Heri, Sanudro, Wahyudi, Ngatijo, dan Rondiyo. penelitian ini juga mengacu pada narasumber yaitu Dimas Tito selaku staf bagian pertambangan, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY, Anjar Arintaka selaku Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bantul, Dewanto Dwipono selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bantul, Suharto selaku Kasi kerusakan Lingkungan DLH Bantul, M.Alwi selaku Camat Pleret dan Miyadiyana selaku Lurah Segoroyoso.

Analisis data dilakukan dengan membaca, mengkualifikasikan, dan menafsirkan sehingga mendapatkan gambaran akan masalah yang diteliti. Proses berpikir yang digunakan secara deduktif yaitu berawal dari hal yang umum ke yang khusus, yang berarti ketentuan perundang-undangan untuk ditarik kesimpulan mengenai penegakan hukum terhadap penambang batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Kondisi Pertambangan Breksi

Pertambangan batuan sangat mudah di temui di kawasan DIY, seperti halnya di Kabupaten Sleman terdapat pertambangan pasir dan batu,

<sup>6</sup><http://www.solopos.com/2016/12/08/tambang-breksi-bantul-aktivitas-tambang-akibatkan-lokasi-jadi-rawan-bencana-774932> yang di akses pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 21:51

di Kabupaten Gunung Kidul terdapat pertambangan kapur, dan di Kabupaten Bantul terdapat pertambangan batuan, salah satunya tambangan batu breksi. Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, wilayah yang diperuntukan bagi kawasan pertambangan batu breksi adalah Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, Pleret, Jetis, dan Pundong.

Pada akhir tahun 2016 pertambangan di Kabupaten Bantul menjadi sorotan media masa, hal ini disebabkan oleh maraknya kegiatan pertambangan batu breksi yang dilakukan secara ilegal.<sup>7</sup> Salah satu wilayah pertambangan yang paling disoroti adalah Kecamatan Pleret. Maraknya penambangan breksi di Kecamatan Pleret dikarenakan memang ketersediaan batu breksi cukup melimpah di kawasan ini, seperti halnya di Dusun Srumbung yang memiliki potensi tambang breksi pumice dengan volume 1,858,097 m<sup>3</sup>, Dusun Sentulrejo yang memiliki potensi tambang breksi pumice dengan volume 1,685,000 m<sup>3</sup> dan Dusun

Jambon Bawuran yang memiliki potensi tambang breksi pumice dengan volume 28,293,000 m<sup>3</sup>.<sup>8</sup>

Namun sayangnya pertambangan breksi di Kabupaten Bantul, khususnya Kecamatan Pleret semakin hari semakin marak dan tidak dilakukan dengan teknik yang benar sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan, bahkan menurut pemberitaan kerusakan lingkungan ini telah memakan korban jiwa.<sup>9</sup>

### c. Pelaku Pertambangan Breksi

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan dapat dilakukan oleh badan usaha, koperasi maupun perseorangan. Miran selaku penambang batu breksi di Desa Segoroyoso menjelaskan bahwa pelaku pertambangan di Kabupaten Bantul khususnya Kecamatan Pleret dilakukan secara manual oleh masyarakat sekitar dan dilakukan secara turun temurun,

---

<sup>7</sup>Diakses melalui <http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/08/tambang-breksi-bantul-penambangan-tak-berizin-ini-cirinya-774983> pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 19:40.

---

<sup>8</sup> Diakses melalui <http://sda.bantulkab.go.id/data/hal/5/6/51/21-data-potensi-tambang-di-kabupaten-bantul>, pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 20:15.

<sup>9</sup>Diakses melalui <http://www.madiunpos.com/2016/12/07/tambang-breksi-bantul-lahan-rusak-makan-korban-perbaikan-tunggu-inisiatif-warga-774675> pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 20 : 21.

dan lahan pertambangannya juga merupakan tanah hak milik perorangan.<sup>10</sup>

Miyadiyana selaku lurah Segoroyoso menjelaskan bahwa memang selama ini penambang berasal dari daerah sekitar karena memang tambang batu breksi merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Segoroyoso, namun sebelumnya memang ada penambang dengan skala besar yang berasal dari luar daerah, tetapi untuk saat ini sudah tidak ada dikarenakan pertambangan dengan skala besar dan menggunakan alat berat hanya berlangsung selama 20-30 hari, sebab dengan adanya pengoperasian alat berat proses pemecahan tebing relatif lebih cepat dibanding dengan pertambangan yang dilakukan secara manual.<sup>11</sup>

Dimas Tito selaku Staf Bagian Pertambangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY menjelaskan bahwa memang selama ini seluruh kegiatan pertambangan batu breksi belum ada satupun yang memiliki izin,<sup>12</sup> namun hal ini berbeda dengan pernyataan Miyadiyana

yang menyatakan bahwa pernah ada satu penambang dengan skala besar yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan Dusun Segoroyoso.<sup>13</sup> Keberadaan izin tersebut patut dipertanyakan, sebab selama ini Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY memang belum pernah menerbitkan IUP bagi penambang batu breksi di Kabupaten Bantul, sehingga besar kemungkinan bahwa izin tersebut merupakan izin palsu.

Walaupun seluruh kegiatan pertambangan batu breksi di Kabupaten Bantul belum memiliki izin, tetapi hingga saat ini mereka masih tetap beroperasi, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan pemerintah terkait adanya aktivitas pertambangan tersebut. Disamping itu, pertambangan batu breksi merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat sekitar, dan hal ini menjadi salah satu alasan Lurah Segoroyoso untuk membiarkan aktivitas tambang tersebut.<sup>14</sup>

Kegiatan pertambangan batu breksi ini dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemilik lahan dengan penambang dan dengan sistem bagi hasil. Sebagian besar

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara pada tanggal 25 April 2017.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Miyadiyana selaku Lurah Segoroyoso pada tanggal 28 April 2017.

<sup>12</sup>Hasil wawancara pada tanggal 19 Mei 2017.

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2017.

<sup>14</sup>*Ibid.*



penambang mengaku, perharinya setiap penambang mendapat penghasilan Rp.50.000,00 hingga Rp.60.000,00 setelah dikurangi Rp.10.000,00 untuk bagian pemilik lahan pertambangan. Hasil tambang ini biasanya diambil dan dibeli oleh pengepul yang berasal dari luar daerah untuk dijual kembali ataupun dimanfaatkan langsung sebagai bahan bangunan.<sup>15</sup> Untuk dapat masuk ke daerah pertambangan para pengepul dikenakan biaya untuk perbaikan jalan sebesar Rp.5000,00 bagi pengepul yang mengangkut batu breksi dengan menggunakan truk, dan Rp.3000,00 bagi pengepul yang mengangkut batu breksi dengan menggunakan mobil *pick up*.

### **c. Dampak Pertambangan Breksi Terhadap Kerusakan Lingkungan**

Setiap kegiatan usaha pasti memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan adalah kerusakan lingkungan. Lingkungan dapat dikatakan rusak apabila terjadi perubahan sifat fisik, kimia, serta hayati lingkungan hidup sudah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Miran selaku penambang breksi, pada tanggal 25 April 2017.

(KBKL). Secara kasat mata dampak dari kegiatan pertambangan batu breksi telah menimbulkan perubahan fisik secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari lahan pertambangan yang semula berbentuk bukit-bukit kini berubah menjadi tebing dan jurang yang curam serta cekungan-cekungan yang dalam. Perubahan bentuk fisik dari lahan pertambangan ini sangat berpotensi menimbulkan bencana alam.

Dewanto Dwipono selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa salah satu titik pertambangan di Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret berpotensi menjadi kawasan rawan bencana, hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan tidak dilakukan dengan teknik yang benar dan tidak adanya kegiatan pemulihan pasca tambang.<sup>16</sup>

Namun tidak selamanya kegiatan pertambangan menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan. Miran selaku penambang menjelaskan bahwa lahan

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Dewanto Dwipono selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, pada tanggal 17 April 2017.

pertambangan yang biasa ditambang justru mendatangkan kebaikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, karena lahan yang sudah selesai ditambang biasanya justru lebih subur dan bisa ditanami berbagai macam tumbuhan. Hal ini mendatangkan keuntungan bagi pemilik dan juga masyarakat sekitar, karena lahan yang sebelumnya merupakan tanah yang gersang, setelah ditambang dapat berubah menjadi perkebunan. Hasil kebun ini kemudian dapat dimanfaatkan langsung untuk makanan sehari-hari, maupun dijual kembali.<sup>17</sup> Selain itu pertambangan batu breksi di Kabupaten Bantul juga mampu mendatangkan kesejahteraan bagi warga sekitar, sebab keuntungan dari hasil tambang sebagian menjadi pemasukan bagi RT maupun RW yang digunakan untuk pembangunan daerah masing-masing, seperti penerangan dan perbaikan jalan.<sup>18</sup>

Pertambangan batu breksi apabila dikelola dengan baik maka dapat mendatangkan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang lebih luas. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul hasil

pertambangan breksi dapat menjadi pendapatan daerah, yang berguna bagi pembangunan daerah. Disamping itu, dengan adanya pertambangan batu breksi ini, banyak tersedia material bangunan di Kabupaten Bantul untuk kegiatan pembangunan. Selain itu, bila lahan pertambangan batu breksi ditambang dengan menggunakan teknik yang benar, maka akan menghasilkan tebing yang indah, kemudian nantinya dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Obyek wisata ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjadi pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk pajak dan retribusi.

#### **d.Langkah Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Breksi Ilegal**

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya, proses dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana harusnya.<sup>19</sup> Penegakan hukum secara umum dapat dibedakan kedalam beberapa jenis, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata.

Menurut P. De Haan, penegakan hukum administrasi

<sup>17</sup>Wawancara dengan Miran selaku penambang breksi pada tanggal, 25 April 2017.

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Ngatijo selaku penambang breksi, pada tanggal 25 April 2017.

<sup>19</sup>Y.Sri Pudyatmoko, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, hlm 11.

diartikan sebagai penerapan sanksi administrasi.<sup>20</sup> Penegakan hukum administrasi adalah kewenangan organ pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah bukan pengadilan atau di luar aparatur pemerintah. Penegakan Hukum administrasi merupakan penegakan hukum yang banyak dilakukan di bidang perizinan. Dalam bidang lingkungan penegakan hukum administrasi dapat berupa pembekuan izin lingkungan ataupun pencabutan izin lingkungan. Dimas Tito selaku Staf Bagian Pertambangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY menjelaskan bahwa penegakan hukum administratif diterapkan kepada pelaku pertambangan yang memiliki ijin namun menyalahi aturan. Sanksi administrasi yang diterapkan berupa penghentian sementara hingga pencabutan ijin operasi tambang,<sup>21</sup> sesuai dengan Pasal 110 ayat (2) PP no 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa sanksi administratif dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK

Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau

c. Pencabutan IUP atau IUPK.

Namun berdasarkan hasil penelitian, hingga saat ini belum ada pelaku pertambangan batu breksi di Kabupaten Bantul yang dikenai sanksi administrasi, sebab memang belum ada penambang batu breksi yang terdaftar sebagai pemegang IUP di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY sehingga tidak dapat dikenai sanksi administrasi.<sup>22</sup> Hal ini berarti penegakan hukum yang dapat dikenakan bagi penambang batu breksi di Kabupaten Bantul adalah penegakan hukum pidana, sebab pertambangan yang dilakukan adalah pertambangan ilegal atau pertambangan yang tidak memiliki ijin.

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan tidak terlepas dari ketentuan pidana, baik ketentuan pidana materiil maupun ketentuan pidana formil.<sup>23</sup> Menurut Moeljatno, hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang) dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.<sup>24</sup>

<sup>20</sup>*Ibid. Hlm 116*

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Dimas Tito selaku Staff bagian Pertambangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY pada tanggal 9 Mei 2017

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 217.

<sup>24</sup><http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurut->

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan terkait pertambangan dapat dikenakan terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam UUPLH ataupun UU Minerba. Sebagai contoh, orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, dapat diberi sanksi pidana yang berupa pidana penjara paling lama 10 tahun, sesuai dengan Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa :

setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Anjar Arintaka selaku Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa sebelum dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap para pelaku pertambangan ilegal, biasanya dilakukan pembinaan dan pemberian himbauan kepada penambang ilegal sebagai bentuk peringatan pertama, kemudian apabila para penambang masih *memandel* barulah dilakukan penertiban dan pelaporan kepada pihak yang berwenang untuk

dikenakan sanksi pidana.<sup>25</sup> BPBD Bantul sebelumnya telah melakukan pembinaan langsung terhadap para pelaku pertambangan batu breksi ilegal pada waktu kasus meninggalnya 2 anak akibat tenggelam dalam kubangan air yang terbentuk akibat kegiatan tambang.<sup>26</sup> Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum pidana bagi pelaku pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul belum terlaksana, sebab hingga kini kegiatan pertambangan batu breksi di kabupaten bantul memang belum terpantau oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Hingga saat ini langkah yang sudah ditempuh barulah pembinaan dan pemberian himbauan yang dilakukan oleh BPBD Bantul saja, sebab selama ini instansi pemerintah Kabupaten Bantul yang mengetahui adanya kegiatan pertambangan batu breksi ilegal tersebut hanyalah BPBD Bantul dan Lurah Segoroyoso. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan koordinasi yang baik, sehingga keberadaan kegiatan pertambangan batu breksi ilegal dapat terpantau oleh semua instansi pemerintahan maupun

---

[para-pakar.html#](#) diakses pada tanggal 3 April 2017, pukul 01:00

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Anjar Arintaka selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 19 April 2017.

<sup>26</sup>BPBD Bantul, *Loc Cit.*

aparatus penegak hukum. Selain penegakan hukum pidana, langkah penegakan hukum lain yang dapat diambil adalah penegakan hukum perdata.

Penegakan hukum perdata merupakan penerapan hukum dalam bidang keperdataan. Menurut Salim HS hukum perdata adalah hukum yang mengatur mengenai subyek hukum satu dengan yang lain demi menjaga hubungan dalam kehidupan.<sup>27</sup> Dalam bidang lingkungan penegakan hukum perdata terjadi ketika ada pihak yang dirugikan karena pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui pengadilan, dan melalui luar pengadilan. Penegakan hukum perdata dalam bidang lingkungan hidup dapat berupa ganti kerugian maupun pemulihan fungsi lingkungan hidup.<sup>28</sup> Kasus keperdataan di bidang pertambangan batu breksi hingga saat ini belum pernah terjadi. Hal ini bisa terjadi karena lahan yang dijadikan lokasi kegiatan pertambangan batu breksi merupakan lahan milik perseorangan, dimana kegiatan pertambangan memang sudah

disetujui oleh pemilik lahan,<sup>29</sup> sehingga besar kemungkinan kerusakan lingkungan yang timbul akibat dari kegiatan pertambangan batu breksi dianggap tidak merugikan pemilik lahan. Pemilik lahan tidak merasa dirugikan karena pertambangan batu breksi ini justru mendatangkan keuntungan. Selain keuntungan ekonomi, lahan yang sudah selesai ditambang dapat ditanami berbagai macam tumbuhan dan dapat dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil penelitian hingga saat ini belum ada langkah penegakan hukum terhadap pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul, baik penegakan hukum administrasi, pidana maupun perdata. Belum terlaksananya langkah penegakan hukum disebabkan karena ketidaktahuan pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketidaktahuan ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan aparat penegak hukum. Apabila terdapat koordinasi yang baik, maka kegiatan pertambangan batu breksi ilegal ini dapat terantau, sehingga pemerintah dapat melakukan pembinaan dan

---

<sup>27</sup><http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 3 April 2017, pukul 01:18.

<sup>28</sup>Syahrul Machmud, *Op. Cit.*, hlm 194.

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan Rondiyo selaku penambang batu breksi, pada tanggal 25 April 2017.

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Miran Selaku penambang batu breksi, pada tanggal 25 April 2017.

pengawasan terhadap para pelaku pertambangan.

#### **e. Kendala Penegakan Hukum**

##### **Ketidaktahuan**

pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi secara periodik antara Kantor Pelayanan Perizinan Propinsi DIY dengan aparat penegak hukum di Kabupaten Bantul. Apabila terdapat koordinasi yang baik maka pemerintah dapat melakukan pendataan terkait kegiatan pertambangan batu breksi ilegal tersebut, sehingga dapat dilakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap para penambang batu breksi ilegal tersebut. Salah satu penambang batu breksi di dusun srumbung mengaku bahwa sejak ia mulai menambang hingga saat ini memang belum ada pengawasan ke lokasi,<sup>31</sup> hal ini diperkuat oleh pernyataan Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Camat Pleret yang menyatakan belum mengetahui adanya praktek pertambangan batu breksi di kawasan Kabupaten Bantul.

Selain ketidaktahuan, kesan saling melempar tanggung jawab antara pemerintahan

Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul juga menjadi kendala penegakan hukum terhadap pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul. Dimas Tito selaku Staff Bagian Pertambangan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY menjelaskan bahwa kabupaten memiliki wewenang untuk melakukan penertiban,<sup>32</sup> namun hal ini berbeda dengan pernyataan Anjar Arintaka selaku Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bantul yang menjelaskan bahwa wewenang penertiban berada di Provinsi.<sup>33</sup>

Kesan saling melempar ini bisa terjadi karena pada saat ini merupakan masa transisi atau masa peralihan wewenang perizinan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang mengalihkan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Peralihan wewenang ini tentu memerlukan waktu untuk

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ngatijo selaku penambang batu breksi ilegal, pada tanggal 25 April 2017.

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Dimas Tito selaku staf bagian pertambangan Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu DIY, pada tanggal 9 mei

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Anjar Anjar Arintaka selaku Kabid Penegakan Perda Satpol PP Bantul, pada tanggal 19 April 2017.

penyesuaian, sehingga pada saat ini sebagian instansi pemerintahan masih kebingungan terkait kewenangan mereka masing-masing. Namun seharusnya kebingungan ini dapat diminimalisasi dengan cara melakukan kegiatan koordinasi secara periodik antara pemerintahan Provinsi DIY, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY sebagai instansi yang menerbitkan ijin, dengan aparat penegak hukum (Satpol PP dan kepolisian) Provinsi DIY dan Kabupaten Bantul.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya maka dapat dikemukakan simpulan bahwa :

1. Penegakan hukum terhadap pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul hingga saat ini belum terlaksana karena ketidaktahuan pihak pemerintahan dan aparat penegak hukum tentang keberadaan pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul.
2. Kendala dalam penagakan hukum terhadap penambang batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul adalah kebingungan beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi DIY terkait wewenang mereka masing-masing. Hal ini

disebabkan oleh karena saat ini merupakan masa peralihan wewenang perizinan pertambangan dari pemerintah daerah kabupaten kepada pemerintah provinsi berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu kurangnya koordinasi secara periodik diantara pemerintahan juga menjadi kendala dalam penagakan hukum terhadap penambang batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul, sebab saat ini instansi yang mengetahui tentang adanya aktivitas pertambangan batu breksi ilegal di Kabupaten Bantul hanyalah pihak BPBD dan Lurah Segoroyoso.

#### 5. REFERENSI

##### Daftar Pustaka

##### Buku :

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Peizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Yani, 2007, *GeografiMenyikap Fenomena Geosfer*, Jakarta, Grafindo Media Pratama.
- Inu Kencana Syafiie, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Salim.H, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,

Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Samadi, 2006, *Geografi 2 SMA kelas XI*, TK, Yudhistira.

Sri Pudyatmoko.Y, 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.

-----, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT Grasindo.

Sunaryati Hartono, 1995, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

#### **Internet :**

<http://www.transformasi.net/articles/read/134/pengertian-pertambangan-mineral-dan-batubara.html>

<http://www.pengertianologi.com/2015/05/Pengertian-Proses-Terbentuk-Ciri-Batu-Breksi-Adalah.html?m=1>

<http://jogja.antaranews.com/berita/332062/bantul-tidak-berwenang-mengeluarkan-izin-tambang>

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/07/tambang-breksi->

[bantul-lahan-rusak-makan-korban-perbaikan-tunggu-inisiatif-warga-774675](http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/08/tambang-breksi-bantul-aktivitas-tambang-akibatkan-lokasi-jadi-rawan-bencana-774932)

<http://www.solopos.com/2016/12/08/tambang-breksi-bantul-aktivitas-tambang-akibatkan-lokasi-jadi-rawan-bencana-774932>

<http://www.pengertianologi.com/2015/05/Pengertian-Proses-Terbentuk-Ciri-Batu-Breksi-Adalah.html?m=1>

<http://ilmugeografi.com/geologi/batuan-breksihttp://m.harianjogja.com/baca/2016/12/20/tambang-ilegal-bantul-izin-eksplorasi-jadi-kedok-tambang-ilegal-777999>

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/08/tambang-breksi-bantul-penambangan-tak-berizin-ini-cirinya-774983>

<http://sda.bantulkab.go.id/data/hal/5/6/51/21-data-potensi-tambang-di-kabupaten-bantul>

<http://www.madiunpos.com/2016/12/07/tambang-breksi-bantul-lahan-rusak-makan-korban-perbaikan-tunggu-inisiatif-warga-774675>

<http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-pakar.html#>

<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli/>

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**



- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 1 Tahun 2014 jo. PP Nomor 77 Tahun 2014 jo. PP Nomor 1 Tahun 2017), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Daerah Bupati Bantul, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 17 Tahun 2005.